

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi buruk. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia :774) kualitas dapat diartikan sebagai sesuai dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan sektor publik hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah no 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2010:161) adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat dan gambaran. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pembuatan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh masing-masing SKPD selanjutnya laporan keuangan tersebut konsolidasikan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang kemudian menjadi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Setelah dikonsolidasikan menjadi LKPD tidak langsung dipublikasi namun di periksa terlebih dahulu oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menyatakan opini atas laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) yang kemudian dipublikasi dan dilaporkan kepada stakeholder. Oleh karena itu kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dari opini BPK. Apabila angka-angka yang tersaji dalam LKPD bukanlah yang sesungguhnya, maka informasi yang terkandung dalam rasio keuangan yang dianalisis untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi kurang tepat. Para pengguna LKPD antara lain pemerintah daerah (internal), DPRD, badan pengawas keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.

Banyaknya kasus tentang buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK masih relatif sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK pada bulan september 2015 yang memberikan informasi bahwa LKPD yang diaudit oleh BPK yang memperoleh opini WTP hanya 26% (105) dari 398 kabupaten dan 38% (35) dari 93 kota. Menurut badan pengawas

keuangan dan pembangunan (BPKP) tidak diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/ daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, pemerintah daerah memerlukan adanya implementasi sebuah sistem aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan, yaitu sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah ditingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun ditingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client, server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk dapat menggunakan aplikasi SIMDA diperlukan seorang *user* atau sumber daya manusia yang berkualitas. Nassarudin (2008) dalam Ihsanti (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karna sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemahaman dalam akuntansi pemerintah dan penguasaan penggunaan aplikasi yang ada.

Seorang karyawan dalam bekerja tidak bisa terlepas dari dukungan, perintah, atau aturan dari seorang atasan. Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Dalam mendukung kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dukungan manajemen puncak dapat seperti pemberian motivasi kepada karyawan, pengawasan kerja, maupun pemberian pelatihan kepada karyawan. Hal tersebut dapat berdampak positif dalam proses pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa peneliti yang pernah meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Ole (2014), Sukmaningrum (2012), Wati (2014), Ningsih (2014), Alfian (2015). Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang direplikasi dari Ole (2014) yang berjudul analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti menambahkan dua variabel yaitu kualitas sumber daya manusia yang diambil dari penelitian Sukmaningrum (2012) dan Alfian (2015) sedangkan dukungan manajemen puncak yang diambil dari penelitian Ningsih (2014) dan Alfian (2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mengenai pengaruh implementasi SIMDA, kualitas SDM dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Oleh karena itu penulis menentukan penelitian yang berjudul **PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?
3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi objek penelitian yang digunakan adalah koresponden yang merupakan pegawai yang berkaitan dengan keuangan/akuntansi/perbendaharaan di lingkup

Pemerintah Kabupaten Tegal yang menggunakan aplikasi SIMDA dalam penyusunan laporan keuangannya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui analisis pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui analisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui analisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai

langkah perbaikan bagi pemerintahan di masing-masing dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya

d. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian laporan keuangan pemerintah daerah, pengertian implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA). Sumber daya manusia, dan dukungan manajemen puncak serta kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sample, data dan sumber data, teknik pengambilan data dan secara analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, gambaran data yang terkumpul, pengujian data, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan akhir, serta sasaran-sasaran yang diperlukan.